



## Pengaruh *Oligarki* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

### *The Effect of Oligarchy on Indonesia's Economic Growth*

Nirwana Br. Bangun<sup>1</sup>, Teja Rinanda<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

<sup>2</sup>STIE Graha Kirana

Corresponding author\*: [trinanda88@gmail.com](mailto:trinanda88@gmail.com)

#### Abstrak

Oligarki ekonomi, atau penguasaan aset-aset kekayaan negara kepada segelintir orang atau kalangan yang dekat dengan pihak kekuasaan, sangat berbahaya karena berpotensi menghambat pertumbuhan perekonomian nasional. Adapun hasil dari pembahasan karya ilmiah ini yaitu pengaruh oligarki terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia berupa terjadinya ketimpangan perekonomian masyarakat. Hasil bahasan pengamat ekonomi Indonesia rasionya yaitu per September 2021 sebesar 0,381, rasio ketimpangan ini menurun dari Maret 2021 yang sebesar 0,384 dan juga lebih rendah dibandingkan rasio pada September 2020 yang sebesar 0,385. Indeks ketimpangan ini makin mendekati nol makin menunjukkan tingkat kesenjangan yang makin menyempit. Kalau mendekati satu, kesenjangan tinggi. Namun, Koefisien ketimpangan ini pun belum tentu mencerminkan tingkat ketimpangan di Indonesia yang sebenarnya. Ketimpangan terkait erat dengan kemiskinan karena secara mendasar adalah indikator kemiskinan relatif, yaitu kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Rendahnya ketimpangan, atau semakin meratanya distribusi pendapatan, tentunya merupakan salah satu agenda penting pembangunan ekonomi.

**Kata Kunci:** Pengaruh; Oligarki; Pertumbuhan Ekonomi; Indonesia.

#### Abstract

*Economic oligarchy, or the control of state assets to a handful of people or those who are close to those in power, is very dangerous because it has the potential to hamper national economic growth. The results of the discussion of this scientific work are the influence of oligarchy on Indonesia's economic growth in the form of economic inequality in society. The results of the discussion by Indonesian economic observers are that as of September 2021 it is 0.381, this inequality ratio has decreased from March 2021 which was 0.384 and is also lower than the ratio in September 2020 which was 0.385. This inequality index is getting closer to zero, the more it shows the level of inequality is getting narrower. If it is close to one, the gap is high. However, this inequality coefficient does not necessarily reflect the actual level of inequality in Indonesia. Inequality is closely related to poverty because it is basically an indicator of relative poverty, namely the gap between the rich and the poor. The low inequality, or the more even distribution of income, is certainly one of the important agendas of economic development.*

**Keywords:** Influence; Oligarchy; Economic growth; Indonesia.

## **PENDAHULUAN**

Arti oligarki menurut Winters yang merupakan professor dari Northwestern University menjelaskan mengenai oligarki yang dibagi dalam dua dimensi.

Pertama oligarki berdasarkan kekuasaan serta kekayaan material yang disebut sulit untuk dipecah ataupun seimbangkan.

Kedua, oligarki jangkauan kekuasaan yang cukup luas dan sistemik, walaupun memiliki status minoritas dalam suatu kelompok ataupun komunitas. Karena itulah arti oligarki menurut Winters menjelaskan bahwa kekuasaan tersebut sulit dipecah dan jangkauannya harus sistemik.

### **ciri-ciri oligarki yaitu:**

- 1) Suatu kelompok kecil di masyarakat mengendalikan dan memegang kekuasaan berdasarkan beberapa faktor yakni seperti kekayaan material, keluarga atau yang setara lainnya.
- 2) Terjadi kesenjangan di masyarakat yang tidak merata dalam hal kekayaan material. Karena itulah penguasa akan semakin kaya dan kemiskinan bisa meningkat.
- 3) Lekat dengan uang dan kekuasaan. Dengan kata lain ada uang apapun bisa dilakukan termasuk mendapatkan kekuasaan.
- 4) Hanya mempertahankan kekayaan dengan kekuasaan yang sudah diperoleh.

### **Kelebihan dan Kekurangan Oligarki**

Seperti halnya bentuk pemerintahan suatu negara lainnya, ada sejumlah kelebihan dan kekurangan oligarki. Sebab itulah perlu tahu juga apa saja arti oligarki beserta kelebihan dan kekurangannya. berikut ini alasan mengapa oligarki masih tetap ada hingga beberapa negara memilih untuk tidak menerapkannya.

#### **Kelebihan Oligarki yaitu:**

- 1) Mendorong masyarakat untuk diberi kebebasan melakukan inovasi dan bekerja.
- 2) Kekuasaan yang terpusat sehingga memudahkan pemerintah dalam mengambil suatu keputusan.

#### **Kekurangan Oligarki yaitu:**

- 1) Memicu konflik dan pemberontakan dari masyarakat akibat sistem oligarki yang tidak seimbang.
- 2) Kekuasaan akan terus dikuasai oleh kelompok elit tanpa ada pergantian. Karena segala cara dilakukan agar bisa mempertahankan kekuasaan atau jabatan mereka di pemerintahan.
- 3) Penguasa akan semakin kaya.

Terkait adanya pengaruh oligarki terhadap perekonomian di Indonesia penulis melakukan penelitian melalui mencari sumber data valid tentang hal tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Metode penelitian Survey. menurut Sugiyono penelitian survey berarti penelitian terhadap populasi besar atau kecil dengan mempelajari sampel data yang berasal dari populasi. Tujuannya adalah untuk menghadirkan kejadian yang relatif, distribusi, dan berkaitan erat antar variabel psikologis dan juga sosiologis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Oligarki ekonomi di Indonesia berkorelasi positif dengan ketimpangan dan disinyalir menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi, kata Direktur Eksekutif Megawati Institute, Arif Budimanta dalam diskusi "Bahaya Oligarki Ekonomi" yang digelar Megawati Institute di Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Oligarki ekonomi, atau penguasaan aset-aset kekayaan negara kepada segelintir orang atau kalangan yang dekat dengan pihak kekuasaan, sangat berbahaya karena berpotensi menghambat pertumbuhan perekonomian nasional.

Menurut Arif, oligarki ekonomi dapat menerangkan mengapa sejak reformasi yang diharapkan dapat menegakkan demokratisasi serta keadilan ekonomi, namun yang terjadi antara lain adalah fenomena meningkatnya ketimpangan, terindikasi dari meningkatnya Ketimpangan dalam berbagai bidang, termasuk penguasaan lahan atau tanah hingga aset keuangan.

Hasilnya, ujar dia, pada saat ini kekayaan terkonsentrasi pada segelintir penduduk, bahkan sejumlah kajian juga menunjukkan bahwa 1% rumah tangga terkaya di Indonesia menguasai 45,4% dari total kekayaan negara.

Ia juga mengingatkan bahwa oligarki terjadi karena tingkat pengembalian kapital pelaku ekonomi lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi nasional, dan ada unsur patrionalisme kapitalisme, yaitu penguasaan modal yang berbasis kepada kekuatan aset yang dimiliki sekelompok atau jaringan keluarga, dan diwarisi dari waktu ke waktu.

"Oligarki juga berasosiasi dengan pemerintah yang lebih birokratis dan lebih intervensionis, juga dengan perkembangan pasar finansial yang kurang berkembang. Penguasaan di tangan oligarki dapat merusak perkembangan institusi yang penting bagi pertumbuhan ekonomi," ucapnya.

Untuk itu, Arif merekomendasikan agar pemerintah mempercepat redistribusi aset dan akses untuk meningkatkan penguasaan aset masyarakat bawah, mempercepat pelaksanaan kebijakan dana desa, menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, dan perlunya fokus menjadikan UKM sebagai tulang punggung perekonomian seperti yang terjadi di Taiwan, Jerman, dan negara-negara di kawasan Skandinavia.

Sementara itu, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf menuturkan, oligarki cenderung membuat pasar terkonsentrasi yang mengakibatkan praktik monopoli dan kartel atau persekongkolan antarusaha dalam mengatur harga sehingga konsumen membayar dalam tingkat harga yang tidak wajar.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menegaskan penurunan kemiskinan dan ketimpangan masih akan menjadi prioritas pada 2018.

"Pemerintah akan melaksanakan strategi kebijakan yang menysasar 40% penduduk termiskin, dengan perhatian khusus pada penyediaan jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perluasan akses usaha mikro, kecil, dan menengah," katanya pada Dialog Akhir Tahun dan Temu Media "Outlook Pembangunan 2018: Tantangan pada Tahun Politik" di Gedung Bappenas, Jakarta.

setiap tanggal 1 Oktober, Indonesia biasanya berkabung untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah ideologi "tengah" yang telah memosisikan Indonesia sebagai entitas berbeda dan independen dari tangan-tangan kolonialis-imperialis, komunis agresionis, maupun dari tangan-tangan separatistis invasionis yang ingin menyetir arah

bangsa sesuai keyakinan komunal yang di-fait accompli sebagai keyakinan yang layak secara nasional. Setiap kali bertemu dengan tanggal tersebut, Pancasila diposisikan kembali sebagai “simbol yang terselamatkan” karena “konon” ketika itu ada sebuah simbol baru yang “konon pula katanya” super agresif secara domestik dan ekstra ekspansionis secara internasional, yang ingin menurunkan gambar burung Garuda dari dinding Istana Negara. Sehingga spirit ideologis plus nostalgis tertempel kuat pada hari itu dan hampir pasti akan hilang begitu saja sehari setelahnya karena “sindrom memori pendek” yang sudah biasa mendarah daging di dalam diri anak bangsa pascamerdeka. Dan memang begitulah sentimen ideologis bekerja, butuh patok-patok waktu dan lempengan-lempengan ingatan untuk menggelorakannya.

Terlepas dari malapetaka yang kemudian berhasil mengeramatkan tanggal 1 Oktober tersebut, nampaknya saat ini agak jarang kita berbicara tentang Pancasila sebagai sebuah cita-cita demokrasi ekonomi yang sangat diidam-idamkan oleh para pendiri negara sedari dulu, sebut saja, misalnya, yang paling dominan adalah Bung Hatta. Karena itu, ada baiknya kebiasaan bernostalgia secara ideologis tersebut kita alihkan kepada ingatan nilai-nilai demokrasi ekonomi yang tersirat komprehensif di dalam ajaran Pancasila, agar bisa menjadi “patok ideologis” bagi penguasa-penguasa baru yang bermunculan, saat ini maupun yang akan datang, di daerah maupun di level nasional.

Secara umum, sudah menjadi imperatif ideologis bagi bangsa Indonesia untuk berjuang tanpa lelah menjaga irama demokratisasi sampai ke titik konsolidasi sebagaimana diamanatkan sila keempat Pancasila. Kemudian, jika irama demokrasi sudah relatif stabil, baik secara institusional maupun prosedural, maka sila kelima Pancasila akan menyempurnakannya (keadilan sosial). Dengan sederhana bisa diartikan bahwa dibutuhkan komitmen demokrasi yang tinggi, konsisten, dan berkelanjutan, untuk memperjuangkan berdiri tegaknya keadilan sosial dan bertumbuhkembangnya kesejahteraan masyarakat. Dengan lain perkataan, segala daya upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi sejatinya harus pula berbanding lurus dengan konsistensi dan sustainabilitas peningkatan kualitas keadilan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Idealitas ideologis semacam ini tentu sekadar netral di atas kertas, namun cenderung distortif dan reduktif pada tataran teknis operasionalnya. Kita semua memahami bahwa demokratisasi pastinya bukanlah sekadar urusan penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil semata (procedural democracy) alias “schumpeterian democracy”. Namun juga soal persamaan kesempatan beserta segala usaha untuk mendukung kesamaan kapasitas semua warga negara di segala bidang persaingan (pemberdayaan/empowerment). Artinya, persamaan kesempatan tidak hanya soal aturan main yang fair (fairplay), tapi juga harus diiringi dengan upaya-upaya untuk menyeimbangkan kapasitas persaingan (playing level capacity), harus ada proteksi untuk yang tak berdaya dan measurable support untuk yang lemah. Apalagi jika demokratisasi tersebut berjalan di bawah agenda setting liberalisasi ekonomi dengan panji-panji globalisasi. Maka pertaruhannya adalah amanat konstitusi yang mengharuskan negara untuk melindungi segenap tumpah darah dan seluruh rakyat Indonesia.

Liberalisasi ekonomi akan mereduksi kekuasaan negara atas eksistensi pasar (self regulating market) dan membiarkan dinamika ekonomi bergerak dalam peta buta “invisible hand” ala Adam Smith. Nah, darwinisme ekonomi semacam ini pada gilirannya akan memperbesar ketimpangan ekonomi, kerusakan alam, dan mendorong terjadinya alienasi

sosial terhadap lapisan masyarakat yang tak berdaya, masyarakat yang terpinggirkan oleh ganasnya persaingan kehidupan sosial ekonomi. Arti lanjutannya, agenda kesejahteraan sosial juga akan ter subordinasi ke bawah bayang-bayang kepentingan pihak-pihak yang kuat atau pemilik modal, bahkan oligarki. Walhasil, Pasal 33 UUD 1945 yang berfungsi sebagai roh dari demokrasi ekonomi Pancasila akan terus digiring menjauh dari idealitas konstitusionalnya.

Padahal Bung Hatta sudah berjibaku hampir setengah mati untuk memperjuangkan Pasal 33 tersebut masuk ke dalam batang tubuh UUD 1945 di tengah-tengah sengitnya percaturan ideologi antara sayap kiri dan sayap kanan di masa lalu itu. Dan pada akhirnya beliau bisa mendamaikan keduanya cuma dengan satu pasal plus tiga ayat tersebut. Tentu spirit yang terkandung di dalamnya tidak hanya berkat andil besar dari moralitas dan intelektualitas ekonomi seorang Mohammad Hatta saja. Bahkan substansi dalam pasal tersebut beliau serap dengan sangat brilian dari Tan Malaka sekira dua puluh tahunan sebelum UUD 1945 ada. Ketika Hatta masih menjadi seorang mahasiswa baru di Belanda, pada Juli 1922, ia pernah bertemu dengan Tan Malaka di Berlin, Jerman.

Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Darsono tersebut Hatta mendapatkan pemahaman awal mengenai interpretasi Tan Malaka terkait “komunisme”, yang notabene berbeda jauh dengan interpretasi versi Lenin-Stalin. Dalam penjelasan Tan Malaka mengenai “diktatur proletariat” di pertemuan itu, yang juga sekaligus merupakan kritik Tan Malaka terhadap interpretasi Lenin- Stalin dan Uni Soviet, Hatta memperoleh kata-kata yang belakangan menjadi “keramat”, yakni: “Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat”. Ya, kata-kata yang belakangan menjadi Penjelasan atas Pasal 33 UUD 1945 itu diserap oleh Hatta dari Tan Malaka, meski secara redaksional ditampilkan dalam bahasa yang kontekstual dan tidak tendensius.

Liberalisasi ekonomi yang ingin dipagari oleh pasal Bung Hatta tadi akan membuat kekuasaan pemerintah (penguasa) menjadi tumpul pada sisi-sisi tertentu dan dialihkan pada mekanisme dan dinamika pelaku pasar, baik domestik maupun global. Namun celakanya, di sisi lain, penguasa (atau calon penguasa) kian membutuhkan sumber-sumber dana alternatif untuk memenangkan kontestasi demokrasi yang semakin mahal. Sehingga situasi dilematisnya adalah bahwa di satu sisi kekuasaan politik terhadap dinamika ekonomi relatif konstan, bahkan tak jarang malah berkurang, namun disisi lain aktor-aktor ekonomi (pengusaha, konglomerasi, oligar) terjun ke arena politik untuk menawarkan sumber-sumber dana alternatif demi membiayai kontestasi demokrasi (political financing) yang kian mahal tersebut.

Dalam relasi mutualisme simbiosis semacam itulah barter dan konsesi-konsesi ekonomi politik dilahirkan (Stein Ringen, *Journal Democratization*, vol.11, April 2004). Selanjutnya, di bawah agenda setting seperti itu pula, akhirnya aglomerasi modal hanya akan berpusat di lingkaran segelintir elite ekonomi (konglomerasi/oligarki) yang mampu menjamin ketersediaan dana untuk menutupi ongkos kontestasi demokrasi yang super mahal. Sudah bisa dipastikan, relasi ekonomi politik koruptif seperti itu akan menjadi biang perlambatan pembangunan dan meningkatkan disparitas antara kalangan berada (the have) dengan kalangan papa (the have not) alias minimnya pemerataan.

Disparitas pendapatan yang menyakitkan tersebut tentu bukan isapan jempol belaka. Kian hari, daftar 50 orang terkaya Indonesia berlomba menambah hartanya untuk

mengejar peringkat tertinggi versi majalah Forbes, misalnya. Kecepatan penambahan harta mereka berlipat dibanding peningkatan gaji pekerja atau standar hidup rakyat kebanyakan. Mereka seolah-olah berlomba mengokupasi kavling demi kavling kekayaan nasional Indonesia atas nama prestise dan kebanggaan diri, bersamaan dengan pemerintahan yang kian cenderung berposisi sebagai penjaga pertumbuhan harta kekayaan para oligar demi lancarnya pembiayaan politik di satu sisi dan kontribusi pada pendapatan negara di sisi lain. Bahkan pemerintah cenderung berwatak "sosialis" di saat para pembesar bisnis mulai mengalami "gagal pasar," tapi sangat "liberal kapitalis" kepada rakyat di saat yang sama, dengan melepas kran-kran proteksi pada bidang dan produk yang semestinya diproteksi atas nama kepentingan publik.

Skandal BLBI adalah salah satu contoh betapa "sosialis"-nya pemerintah kepada para pembesar bisnis, atau penanaman modal negara pada BUMN dari tahun ke tahun yang nominalnya hampir selalu lebih besar ketimbang kontribusi langsung BUMN pada pendapatan negara. Atau alokasi dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang angkanya jauh lebih besar untuk para pengusaha ketimbang untuk rakyat, plus perundangan-perundangan baru yang cenderung menaikkan rasa percaya diri para pembesar bisnis ketimbang kepercayaan diri rakyat kebanyakan. Dalam kacamata ekonomi neoklasik, apa yang dilakukan pemerintah tentu masih bisa ditoleransi, terutama terkait dengan intervensi di saat kegagalan pasar (market failure) terjadi. Tapi dalam kacamata pembangunan (developmentalism), intervensi pemerintah semestinya menghasilkan penguatan fundamental ekonomi nasional, bukan malah memperbesar pembatas antara rakyat kebanyakan dengan kelompok oligarki yang kian hari kian leluasa mengokupasi berbagai lini pengambilan kebijakan publik. Walhasil, fundamental ekonomi Indonesia tetap rapuh, meskipun disembunyikan secara apik di balik angka-angka makro ekonomi yang moderat.

Pemerintah sangat terobsesi menginjeksikan "virus pemerintah kuat" ke dalam tubuhnya di satu sisi, tapi gagal membangun pilar Pasal 33 UUD 1945 yang kuat alias gagal menginjeksikan vitalitas dan keperkasaan bisnis ke dalam BUMN-BUMN yang terkait dengan hajat hidup orang banyak dan nyaris gagal total menjadikan koperasi sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Secara politik, meminjam istilah dari John West dalam bukunya "Asia on the knife edge (2018), demokrasi Indonesia kini hanya tersisa sebagai "demokrasi dari beberapa, untuk beberapa, dan oleh beberapa." Sementara secara ekonomi, meminjam istilah Jeffrey Winters dalam bukunya "Oligarch (2011)," para oligar yang sebelumnya berpusat di bawah satu tangan Soeharto (Winters menyebutnya Sultanic Oligarch) kini berkeliaran di dalam sistem ekonomi dan politik yang berpotensi menggeser demokrasi Pancasila menjadi "criminal democracy." Walhasil, sampai hari ini, demokrasi Indonesia masih tentang para elite, belum tentang ekonomi Pancasila dan kepentingan rakyat banyak.

Di tengah Pandemi Covid-19 telah berdampak kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, termasuk kepada ketimpangan di tanah air. Ketimpangan per September 2021 sebesar 0,381, Ketimpangan ini menurun dari Maret 2021 yang sebesar 0,384 dan juga lebih rendah dibandingkan Ketimpangan pada September 2020 yang sebesar 0,385. Indeks gini ini makin mendekati nol makin menunjukkan tingkat kesenjangan yang makin menyempit. Kalau mendekati satu, kesenjangan tinggi. Namun, Koefisien Gini ini pun belum tentu mencerminkan tingkat ketimpangan di Indonesia yang sebenarnya.

Ketimpangan terkait erat dengan kemiskinan karena secara mendasar adalah indikator kemiskinan relatif, yaitu kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Rendahnya ketimpangan, atau semakin meratanya distribusi pendapatan, tentunya merupakan salah satu agenda penting pembangunan ekonomi.

Bisakah angka koefisien ketimpangan tidak tepat dalam merepresentasikan tingkat ketimpangan di Indonesia yang sebenarnya? Tentu saja.

Penyebab pertama, angka ketimpangan di Indonesia diukur dari angka pengeluaran rumah tangga, bukan angka pendapatan. Karena tingkat tabungannya lebih tinggi, tingkat kekayaan kelompok pendapatan tinggi akan tercatat lebih rendah jika yang dicatat adalah pengeluarannya. Otomatis, ketimpangan akan terkalkulasi lebih rendah.

Penyebab yang kedua adalah jika data yang digunakan untuk menghitung ketimpangan tidak akurat dalam merepresentasikan golongan kaya yang melaporkan pengeluaran lebih kecil dari yang sebenarnya. Under-reporting seperti ini, sangat logis, akan lebih besar di golongan kaya. Penyebab yang lain adalah jika sampel data survei rumah tangga (Susenas) kurang mewakili golongan pendapatan tinggi.

### **Oligarki Akar Ketimpangan**

Akar ketimpangan di Indonesia adalah oligarki ekonomi politik, itu fakta, saat politik yang dirancang oleh para borjuis untuk menopang jalannya ekonomi kapitalistik sebagai sistem ekonomi yang efektif untuk mengakumulasi kapital orang-orang yang diuntungkan oleh politik ekonomi. Pola seperti ini tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan banyak negara-negara demokrasi di dunia.

Para oligark adalah segelintir orang yang punya kekuasaan karena memiliki uang yang lentur dan serbaguna. Uang berguna membeli barang dan jasa, dan punya status khusus dalam sumber daya kekuasaan. Formulasinya sederhana, orang yang punya banyak uang, sekaligus punya banyak kekuasaan politik karena barang dan jasa politik juga ada harganya.

Merunut sejarah, politik ekonomi kita awal kemerdekaan telah menguntungkan segelintir orang-orang kaya pemilik modal. Program Banteng yang digagas Soekarno faktanya telah menyiapkan borjuasi nasional. Para borjuasi ini lantas memanfaatkan momentum ketika ekonomi kita tersambung dengan ekonomi global dan pasar global, lalu muncul perusahaan-perusahaan multinasional yang menjalankan skema ekonomi kapitalistik.

Praktek ini membuat kaum elit semakin diuntungkan. Kekayaan material mereka terakumulasi sedemikian rupa sehingga muncul lah oligarki-oligarki pribumi yang tersambung dengan bisnis oligarki di negara-negara lain, yang semakin memperparah konsentrasi kekayaan.

Kondisi ini oleh Winters, terjadi karena adanya ketimpangan dan konsentrasi kekayaan. Karena seseorang sangat kaya raya sementara orang lain sangat miskin, maka orang-orang yang sangat kayalah yang diuntungkan secara politik. Ia memiliki sumber daya material untuk membeli massa, untuk berkampanye memenangkan posisi yang dipilih dalam pemilu yang bebas dan adil, atau untuk membeli figur penentu di kekuasaan untuk melancarkan bisnis-bisnis yang membuatnya berlimpah kekayaan material.

## **Omnibus Law Monster Oligarki**

Undang - Undang Cipta Kerja bagai Monster oligarki, wajah kekuasaan pemerintah saat ini yang mencengkram dan menguasai berbagai sendi kehidupan masyarakat, seperti energi, pertanian, kebebasan berpendapat, hingga kehidupan masyarakat adat.

Satu tahun pasca-UU Ciptaker disahkan, beberapa konflik lahan yang melibatkan masyarakat melawan perusahaan telah muncul ke permukaan. Sejumlah konflik lahan antara warga dengan masyarakat. Misalnya, kasus gugatan tiga perusahaan sawit dengan Bupati Sorong, Papua; tambang emas di Pulau Sangihe; perebutan lahan yang berbuntut bentrok antara warga dengan aparat, di Wadas, Jawa Tengah.

Sejumlah konflik tersebut merupakan dampak dari pengesahan UU Ciptaker yang telah memberikan peran ganda kepada para elite politik; sebagai pejabat publik sekaligus pebisnis.

Hari ini, Omnibus law telah merubah total wajah Indonesia melalui satu ketukan pengesahan yang menyederhanakan 80 undang-undang dalam 1.244 pasal. Wajah negeri investasi yang dicita-citakan oleh Oligarki akan terwujud melalui aturan ini.

Ironis memang saat kepentingan investasi menjadi sebuah urgensi bagi pemerintah, mengalahkan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, perwujudan kesejahteraan buruh, masyarakat marjinal, miskin kota, petani dan nelayan. Saat ini, kita sekali lagi melihat bagaimana oligarki politik menumbuhkan dengan cepat kaum borjuis, memperlebar kemiskinan di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Dari bahasan di atas diketahui pengaruh oligarki terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia berupa terjadinya ketimpangan perekonomian masyarakat. Hasil bahasan pengamat ekonomi Indonesia rasionya yaitu per September 2021 sebesar 0,381, rasio ketimpangan ini menurun dari Maret 2021 yang sebesar 0,384 dan juga lebih rendah dibandingkan rasio pada September 2020 yang sebesar 0,385. Indeks ketimpangan ini makin mendekati nol makin menunjukkan tingkat kesenjangan yang makin menyempit. Kalau mendekati satu, kesenjangan tinggi. Namun, Koefisien ketimpangan ini pun belum tentu mencerminkan tingkat ketimpangan di Indonesia yang sebenarnya. Ketimpangan terkait erat dengan kemiskinan karena secara mendasar adalah indikator kemiskinan relatif, yaitu kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Rendahnya ketimpangan, atau semakin meratanya distribusi pendapatan, tentunya merupakan salah satu agenda penting pembangunan ekonomi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Jun Surjanti, Musdholifah, Budiono (2018), Edisi belajar teori ekonomi : (pendekatan mikro) berbasis karakter, Penerbit: Yogyakarta : Deepublish.
- Arwin (2020), Pengantar Ekonomi Mikro, penerbit: Cendekia Publisher.
- Sugiyono. (2013: 11). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.CV
- Sugiyono. Statistik untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal.27 dan hal.29.
- Elazhari, 2019. *Policy In the development of social development in society: Study of implementation of regional regulation number 4 of 2008 concerning handling of homeless and beggar in the ...*
- Muhammad Rajali, Elazhari, Khairuddin Tampubolon, (2021). Pencocokan Kurva Dengan

- Metode Kuadrat Terkecil dan Metode Gauss. AFoSJ-LAS: Journal All Field of Science J-LAS, 1(1), 14-22.  
From: <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFOSJ-LAS/article/view/9>
- Khairuddin Tampubolon, & Koto, F. R. (2019). Analisis Perbandingan Efisiensi Kerja Mesin Bensin Pada Mobil Tahun 2000 Sampai Tahun 2005 Dan Mobil Tahun 2018 Serta Pengaruh Terhadap Konsumsi Bahan Bakar Dan Cara Perawatannya Sebagai Rekomendasi Bagi Konsumen. *Jmemme: Journal Of Mechanical Engineering, Manufactures, Materials And Energy*, 3(2), 76-83.  
From [Http://Ojs.Uma.Ac.Id/Index.Php/Jmemme/Article/View/2773](http://Ojs.Uma.Ac.Id/Index.Php/Jmemme/Article/View/2773)
- Wispi Elbar, Khairuddin Tampubolon, (2020), Pengaruh Campuran Silikon Pada Aluminium Terhadap Kekerasan Dan Tingkat Keausannya, *Jmemme: Journal Of Mechanical Engineering, Manufactures, Materials And Energy*, 4(2), 183-196.  
From: <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jmemme/article/view/4070>
- Khairuddin Tampubolon, Fider Lumbanbatu (2020), Analisis Penggunaan Knalpot Berbahan Komposit Untuk Mengurangi Tingkat Kebisingan Pada Motor Suzuki Satria, *Jmemme: Journal Of Mechanical Engineering, Manufactures, Materials And Energy*, 4(2), 174-182.  
From: <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jmemme/article/view/4065>
- Roswirman Roswirman, ELAZHARI(2021) Pengaruh Implementasi Manajemen Mutu Terpadu dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru pada Era New Normal di SMK Swasta PAB 2 Helvetia; AFoSJ-LAS (All Fields of Science J-LAS),V.1,no.4,2021 (hal.316-333).
- Elazhari, 2021. Pengaruh Motivasi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di SMP Negeri 2 Tanjung Balai, AFoSJ-LAS: Journal All Field of Science J-LAS, 1(1), 44-53. From: <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFOSJ-LAS/article/view/7>  
<https://economy.okezone.com/read/2017/12/27/320/1836439/oligarki-picuketimpangan-dan-hambat-pertumbuhan-ekonomi-nasional>
- Jannus TH Siahaan (2022); Ketika Oligarki Mengakali Ekonomi Pancasila; URL: <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/08100051/ketika-oligarki-mengakali-ekonomi-pancasila?page=all>.
- Dr. Noviard Ferzi (2022), Oligarki Ekonomi Politik Kaum Borjuis, URL: <https://jamberita.com/read/2022/02/09/5972110/gini-ratio-dalam-oligarki-ekonomi-politik-kaum-borjuis/>